

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelompok Abu Sayyaf merupakan kelompok radikal yang berbasis di Filipina yang sudah berdiri sejak tahun 1989. Kelompok Abu Sayyaf sering melakukan aksi pengeboman, pembajakan kapal asing, dan pemenggalan kepada para tawanannya (Steckman, 2016, hal. 16). Aksi-aksi tersebut termasuk radikalisasi yang dimana menghasilkan tindak terorisme sehingga kelompok Abu Sayyaf dapat digolongkan sebagai kelompok teroris (HM Government, 2011, hal. 36). Aksi tersebut dikatakan sebagai aksi terorisme karena dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan tidak hanya dalam skala regional namun juga skala global (Buzan, 1991, hal. 50-51). Kelompok Abu Sayyaf sudah banyak melakukan tindak penculikan terutama terhadap turis-turis asing maupun warga sipil setempat (Abuza, 2005, hal. 5).

Pada tahun 2005 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ABK asal Indonesia juga pernah disandera oleh kelompok Abu Sayyaf (Nainggolan, 2016, hal. 5-6). Kasus penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf pun kembali terulang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sepanjang bulan Maret hingga Agustus 2016 sudah ada 7 kasus penculikan oleh Abu Sayyaf. Kelompok ini melancarkan aksi penculikan ABK asal WNI di perairan laut Sulu, Filipina (Kemlu RI, 2017, hal. 32).

Kelompok Abu Sayyaf tidak hanya melakukan penculikan namun juga menyandera korbannya dengan tujuan untuk meminta sejumlah uang tebusan apabila sandera ingin dibebaskan (Abuza, 2005, hal. 11-12). Sikap pemerintah Indonesia yang cenderung persuasif dalam menanggapi kelompok teroris seperti kelompok Abu Sayyaf tersebut menjadi salah satu faktor terulangnya insiden penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf. Sikap yang persuasif tersebut dalam artian pemerintah Indonesia tidak mengadakan operasi militer untuk memberantas kelompok Abu Sayyaf (Karensa, 2016).

Pada kasus penculikan WNI yang terjadi di tahun 2005, proses pembebasan sandera berlangsung hingga hitungan bulan. Proses pembebasan pun dilakukan secara tertutup antar instansi terkait. Pada pembebasan sandera tahun 2005, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pembebasan satu pintu, yaitu negosiasi yang dilakukan antara pihak pemerintah dan kelompok Abu Sayyaf hanya menggunakan satu jalur saja yang terikat kontrak antara pihak pemerintah dengan kelompok Abu Sayyaf (Affan, 2016). Dalam usaha penyelamatan WNI hanya mengandalkan komunikasi dengan satu negosiator, komunikasi lain dengan pihak perusahaan, keluarga ditutup (Artharini, 2016).

Upaya pembebasan WNI pada tahun 2016 terkesan lebih terbuka dibanding sebelumnya. Presiden Joko Widodo tidak hanya membangun komunikasi yang intensif dengan pihak pemerintah Filipina namun juga turut melibatkan aktor non-negara sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam upaya pembebasan WNI dengan tujuan agar upaya pembebasan dapat berjalan dengan cepat tanpa ada pihak yang dirugikan (Humprey, 2016, hal. 6). Meskipun pemerintah Indonesia

mengutamakan upaya negosiasi. Walaupun begitu, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan pasukan militer di Tarakan, Kalimantan Utara (Karensa, 2016).

Dalam upaya pembebasan sandera WNI dari tangan kelompok Abu Sayyaf memang timbul banyak keraguan. Ketika pemerintah Indonesia meyakinkan bahwa dalam upaya pembebasan WNI menggunakan diplomasi murni namun, banyak pula yang berasumsi bahwa dalam upaya pembebasan sandera dari kelompok Abu Sayyaf kemungkinan kecil apabila mereka bersedia melepaskan sandera tanpa adanya uang tebusan. Seperti yang terjadi pada warga negara Kanada, Robert Hall dan John Ridsdel yang tewas di eksekusi oleh kelompok Abu Sayyaf karena tidak dibayarnya uang tebusan yang sudah dijadwalkan (Kemlu RI, 2017, hal. 32).

Hussin Amin Walikota Jolo yang menyambut kedatangan WNI setelah dibebaskan mengatakan bahwa kelompok Abu Sayyaf tidak membebaskan sandernya dengan begitu saja kecuali tebusan yang diminta telah dibayar (Aljazeera, 2016). Selain itu, sekretaris pertahanan negara Filipina Delfin Lorenzana, juga membenarkan bahwa pihak perusahaan yang mempekerjakan sandera WNI sudah membayar tebusan kepada para penyandera di Filipina Selatan sebesar 20 juta peso (Philippines Daily Inquirer, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian, bagaimana upaya *soft power* Indonesia dalam membebaskan sandera Abu Sayyaf pada 2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui implementasi *soft power* dan untuk memahami urgensi dalam upaya pembebasan WNI dari kelompok Abu Sayyaf.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016 terkait upaya pembebasan sandera WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Penelitian ini dirasa cukup penting karena belum banyak peneliti yang membahas tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pemerintah menggunakan *soft power* dalam upaya pembebasan WNI di Filipina. Penulis nantinya juga akan mengaitkan penelitian ini dengan isu serupa yang pernah terjadi sebelumnya agar hasil penelitian yang didapat ini nantinya bisa relevan.

1.5 Cakupan Penelitian

Tulisan ini berfokus pada penggunaan *soft power* pemerintah Indonesia dalam membebaskan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016. Penulis membatasi jangka waktu penelitian pada era Presiden Joko Widodo mengingat bahwa adanya perbedaan kebijakan dalam upaya pembebasan WNI di Filipina pada era Presiden Joko Widodo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono walaupun dalam upaya pembebasan tersebut menggunakan *soft power*.

1.6 Tinjauan Pustaka

Soft power menjadi andalan Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus penculikan dan penyanderaan yang dilakukan kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina Selatan. *Soft power* juga digunakan di berbagai kasus di belahan dunia lainnya. Diplomasi secara “halus” ini dianggap lebih ampuh dibanding diplomasi yang sifatnya koersif. Dalam penulisan tinjauan pustaka, penulis akan mencoba mencari beberapa kasus serupa yang menggunakan *soft power* sebagai jalan keluar dan kemudian penulis akan mencoba untuk menganalisa apakah jalur diplomasi halus ini lebih berhasil digunakan dalam penyelesaian masalah dibanding diplomasi yang sifatnya *koersif*.

Pertama, dalam buku yang berjudul “*TERORISME Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*” (A.M.Hendroproyono, 2009) memang tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pihak pemerintah menyelesaikan masalahnya. Namun, dalam buku tersebut sedikit banyak membahas mengenai aksi-aksi terorisme yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok militan di berbagai negara, salah satunya yang terjadi di India. Kelompok radikal ini melakukan penyanderaan warga sipil di Mumbai serta melakukan serangan-serangan membabi buta di Hotel Taj Mahal pada November 2008. Aksi ini dilakukan oleh kelompok radikal yang dikenal sebagai Laskhar eL-Taiba yang berasal dari Pakistan.

Hingga saat ini, belum ada penyelesaian secara menyeluruh antara India dan Pakistan mengenai teror-teror yang terjadi. Pemerintah India melakukan pengisolasian secara diplomatik terhadap pemerintahan Pakistan karena India

menganggap pemerintah Pakistan bertanggung jawab atas serangan-serangan yang terjadi di India (A.M.Hendroproyono, 2009, hal. 10-12).

Kedua, dalam jurnal yang berjudul “*Soft Power As A Means of Fighting International Terrorism*” karya I.A. Bakare menjelaskan tentang bagaimana *soft power* dapat menjadi alat pendamai di Nigeria. Bakare dalam tulisannya memberikan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi radikalisme oleh kelompok Boko Haram. Dimulai dari rendahnya tingkat pendidikan di Nigeria Utara menjadi penghalang bagi pemuda disana untuk meraih kesuksesannya sehingga menjadikan mereka cenderung melakukan aksi radikal.

Kemudian, adanya tensi tinggi antar kelompok dimana kelompok Boko Haram merupakan sekelompok pemuda Islam di Nigeria yang sangat memegang teguh syariat Islam dan menentang tegas kristenisasi dan budaya barat. Sistem politik di Nigeria yang tidak “bersih” seperti politikus-politikus lokal di Nigeria yang mendukung Boko Haram untuk mempersulit musuh politiknya. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi keberadaan kelompok Boko Haram di Nigeria.

Penggunaan *hard power* dalam kasus Boko Haram tidak akan menghasilkan solusi terbaik, solusi militer dalam melawan terorisme hanya dapat memperkeruh keadaan karena adanya kebobrokan dari dalam yang tidak diselesaikan. Oleh sebab itu dalam tulisannya, Bakare mengatakan bahwa *soft power* bisa melawan aksi terorisme di Nigeria dengan cara memperbaiki sistem pendidikan yang dimana dapat menjadi sarana pencegahan doktrin-doktrin terorisme, pembaruan dalam kurikulum edukasi serta promosi edukasi tentang Islam yang lebih baik

bagi pemuda-pemuda di Nigeria. Kesalahan-kesalahan dalam ajaran Islam yang dapat menjerumuskan pemuda Nigeria ke radikalisme (Bakare, 2016, hal. 285-295).

Ketiga, dalam artikel jurnal yang berjudul “*Kendala Eksistensi Rezim: Implementasi Djibouti Code of Conduct dalam Menanggulangi Perompak Somalia di Samudera Hindia Barat dan Teluk Aden pada Tahun 2011*”, Swastika membahas tentang aksi perompakan dan teror di Somalia. Perompak Somalia yang melancarkan aksinya di wilayah Teluk Aden dan Samudera Hindia bagian barat sangat memberikan dampak buruk bagi pelayaran internasional. Bagaimana tidak, perompak Somalia ini melakukan tindak kriminal seperti penculikan demi mendapatkan uang tebusan. Oleh sebab itu, *International Maritime Organization* (IMO) yang merupakan sebuah organisasi internasional di bidang maritim membentuk sebuah kesepakatan yang terangkum dalam *Djibouti Code of Conduct*.

Dalam kesepakatan ini negara-negara di dunia saling bekerja sama dalam menciptakan keamanan maritim dan pelayaran. Semakin tingginya tingkat aksi perompakan yang terjadi di wilayah meningkatkan urgensi semua pihak baik yang memiliki kepentingan maupun tidak memiliki kepentingan untuk saling bekerja sama. Namun, dalam menanggulangi kasus perompakan di wilayah ini nyatanya masih menjadikan tebusan sebagai jalan keluar pembebasan tawanan.

Dengan memberikan uang sebagai tebusan, justru sama saja dengan membiayai operasional para perompak tersebut. Kerja sama yang terjalin antar negara tentunya dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang lebih mengutamakan

penggunaan diplomasi dalam mengupayakan pembebasan tawanan. Dalam jurnal ini ada penekanan terhadap peningkatan kerja sama internasional yang dirasa sangat perlu ditingkatkan karena kelompok terorisme memiliki jaringan yang luas dalam dunia internasional melampaui batas-batas negara (Swastika, 2015, hal. 9-14).

Keempat dalam artikel jurnal Luh Ashari yang berjudul "*Upaya Indonesia Dalam Memberantas Terorisme*". Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penanganan isu terorisme menjadi fokus utama Indonesia melalui *soft power diplomacy*, seperti melakukan banyak kerjasama internasional baik antar negara maupun dengan organisasi internasional juga seperti PBB dan ASEAN. Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan penggunaan *soft power* sebagai strategi jangka panjang untuk mengatasi terorisme di Indonesia. Pluralisme dan toleransi adalah salah satu jalan yang ditempuh dalam penerapan *soft power* tersebut. Tindakan terorisme ini menjadi ancaman tersendiri bagi kesejahteraan masyarakat domestik, stabilitas keamanan suatu negara dan dapat mengancam keamanan regional (Luh Ashari Sumardewi, 2014, hal. 3-12)

Kelima, Jamaah Islamiah (JI) menjadi salah satu kelompok radikal yang mengancam stabilitas keamanan domestik. Kelompok JI telah banyak melakukan aksi terorisme di Indonesia. Pada karya tulisan "*Jemaah Islamiyah: Lessons From Combatting Islamist Terrorism in Indonesia*" menjelaskan tentang bagaimana pemerintah Indonesia sukses melakukan kampanye melawan aksi terorisme JI sejak pertengahan tahun 2000. Pemerintah Indonesia berhasil membekukan kelompok JI lewat penangkapan anggota kunci dari kelompok JI. Untuk melawan

ideologi kelompok JI, pemerintah Indonesia membuat kebijakan deradikalisasi untuk meruntuhkan tujuan politik dari kelompok JI.

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam berhadapan dengan organisasi teroris Islam radikal melalui dua cara yaitu *hard approach*, dimana pemerintah melakukan identifikasi, penangkapan terhadap teroris sedangkan dari sisi *soft approach*, pemerintah berusaha untuk mengganti *mindset* tentang radikalisme dan terorisme. Dari perspektif *soft approach*, pemerintah mengembangkan program deradikalisasi untuk mengajak mantan anggota militan radikal bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Selain itu, pemerintah melalui aparat kepolisian saling bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk membantu mengidentifikasi terduga teroris dengan memberikan informasi kepada aparat kepolisian setempat. Dengan strategi yang sudah dijelaskan diatas memperlihatkan bahwa praktik *soft approach* memiliki nilai lebih dibanding dengan menggunakan *hard approach* karena dengan *soft approach* maka pemerintah tidak harus mengambil solusi yang mengharuskan pemerintah untuk melanggar kedaulatan negara dan menyebarkan personel militer (Strickler, 2017, hal. 2-10).

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Soft Power

Konsep *soft power* dipopulerkan oleh Joseph Nye, dalam tulisannya Nye menjelaskan bahwa *soft power* adalah kemampuan sebuah negara untuk mencapai kepentingannya melalui pendekatan persuasif. Dalam praktiknya *soft power* dapat

saling bertukar informasi, gagasan, ide-ide dan memperbesar peluang kerja sama suatu negara dengan negara lain. Berbeda dengan *hard power*, yang merupakan kemampuan sebuah negara untuk mempengaruhi negara lain agar melakukan sesuatu dengan cara yang koersif seperti melalui paksaan dan iming-iming atau jauh lebih dikenal dengan istilah “*sticks and carrots*” (Nye, Joseph, 2004, hal. 5).

Nilai-nilai yang terkandung *soft power* dan *hard power* sama pentingnya di dunia politik internasional. Namun ada perbedaan yang lebih menguntungkan dari penggunaan kedua *power* tersebut yaitu *soft power*. *Soft power* mampu merubah perilaku yang lain tanpa adanya kompetisi atau konflik yang ditimbulkan dalam praktiknya dengan menggunakan pendekatan persuasif (Nye, Joseph, 2004, hal. 6-7). Adapun, praktik dari *hard power* pada saat ini dinilai lebih kurang menguntungkan baik secara politik atau finansial. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa praktik *soft power* lebih menguntungkan karena tidak membutuhkan sumber substansial dan konsekuensi sangat terbatas apabila terjadi kegagalan dalam praktiknya (Nye, Joseph, 2004).

Hard power dan *soft power* saling berhubungan satu sama lain karena keduanya memiliki aspek kemampuan untuk mencapai sebuah tujuan yaitu mempengaruhi perilaku lainnya. Perbedaan diantaranya dalam mencapai tujuannya yaitu bergantung pada sifat perilaku yang diberikan dan sumber daya yang digunakan. Nye menampilkan sebuah spektrum dari *behaviors dan resources*, dimulai dari *coercion* yang berada di ujung *hard power* hingga *inducement* lalu *agenda setting* dan berakhir pada *attracton* di akhir *soft power*. *Inducement* atau *payment*, sering ditandai sebagai area yang ambigu. Terkadang,

politik. Kemudian, ada *attraction* yang merupakan kemampuan dari sebuah negara dalam memberikan daya tariknya kepada negara lain (Nye, Joseph, 2004, hal. 7-8).

Selanjutnya terdapat spektrum *resources* yang terdiri dari *institutions* dan *cultures, values, policies*. Yang mana keempat indikator tersebut menjadi *resources* dari *soft power*. Menurut Nye, *institutions* berguna dalam mempromosikan nilai, ide, kebijakan suatu negara baik dengan anggota maupun dengan negara lain. *Institutions* dapat meningkatkan *soft power* dari sebuah negara. Melalui *institutions, power* dari sebuah negara dapat terlegitimasi, dengan memperlihatkan daya tarik budaya dan ideologi yang dimiliki oleh negara tersebut. Dengan membentuk peraturan internasional yang sesuai dengan kepentingan negara tersebut dan nilai-nilainya, maka negara tersebut dapat dipercaya oleh negara lain sehingga negara lain akan dengan senang hati untuk mengikuti negara tersebut (Nye, Joseph, 2004).

Selanjutnya terdapat sumber-sumber dari *soft power* lainnya yang menjadi *main resources* dari *soft power* yaitu *culture, political values, foreign policies*. Nye mengatakan, *culture* sebagai suatu struktur yang memiliki pengaruh sangat penting terhadap suatu bangsa. *Culture* mengacu pada budaya yang tinggi seperti literatur, teknologi, edukasi. Selanjutnya, *political value*. Menurut Nye, sebuah negara tidak benar-benar kuat kecuali negara tersebut memiliki sistem ideologis yang kuat. Sistem tersebut bergantung pada nilai *attraction*, yang mana merupakan komponen penting dari *soft power*. Nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dapat menjadi *attraction* yang sangat kuat dalam *soft power*. Sebuah

negara harus mampu untuk mengekspresikan ide-ide politiknya untuk memperoleh pengakuan internasional dan legalitasnya (Nye, Joseph, 2004, hal. 11-12).

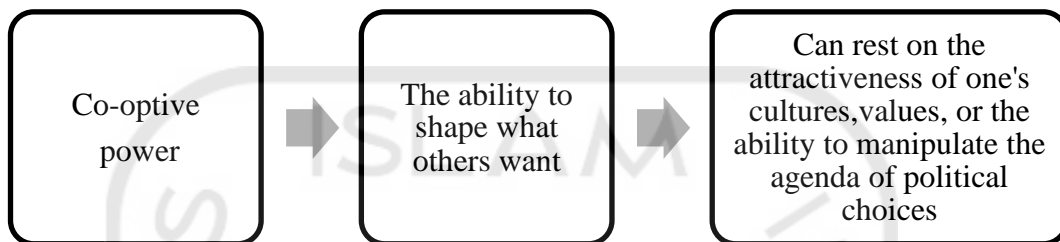
Jika sebuah negara ingin memainkan perannya dalam sebuah agenda politik maka sangatlah penting untuk membangun dan mendominasi aturan-aturan internasional yang dimana dapat mempengaruhi pilihan serta pemahaman dari negara lain mengenai kepentingan nasional negara tersebut (Nye J. , 1992, p. 26). Sumber utama dari *soft power* lainnya adalah *foreign policies*. Suatu nilai-nilai yang dianjurkan oleh sebuah negara baik dalam kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri dan mekanisme internasional mampu mempengaruhi pilihan negara lain. Dalam kata lain, pemerintah mampu menghasilkan *attraction* atau justru menjauhkan negara lain untuk mendukung kebijakan negara tersebut.

Kerja sama (*co-optive*) merupakan ujung tombak dari indikator *soft power* yang artinya *co-optive* tersebut muncul dari *behaviors* seperti *agenda setting* dan *attraction* yang juga didukung oleh adanya *resources* seperti *institutions, culture, values, policies* untuk menjalankan *behaviors* tersebut yang kemudian dihasilkanlah sebuah *co-optive power*. Untuk menjalankan *soft power* digunakanlah *co-optive power* ini dalam mencapai sebuah kepentingan tertentu.

Seperti contoh, negara A melakukan kerja sama dengan negara B, kemudian nantinya ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh negara A agar dapat mengubah atau membentuk keinginan dari negara B, agar nantinya kedua negara tersebut dapat mencapai kepentingan bersama. Dalam mencapai kepentingan

bersama tersebut upaya yang dilakukan oleh negara A tidak lepas dari sumber-sumber *soft power* negaranya.

Bagan 1 Ilustrasi penggunaan *soft power*



Sumber: Joseph Nye (2004)

Penanganan terorisme hanya ada dua cara yaitu, menggunakan *hard power* atau *soft power*, tapi harus ada yang menjadi prioritas utama yang dimana akan bergantung pada situasi terorisme dan kemampuan pemerintah itu sendiri (Alshehri, Abdulhadi, 2010, hal. 16). Dalam upaya melawan aksi terorisme menggunakan pendekatan *hard power* justru akan mengancam keamanan nasional. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda untuk setiap situasi yang dihadapi dan tidak semua aksi terorisme dapat dilawan dengan *hard power* (Värk, 2011, hal. 77).

Pada praktiknya, *hard power* tidak dapat dijalankan sendiri namun juga harus diiringi dengan *soft power* karena pada dasarnya kedua *power* tersebut saling berhubungan (Nye, Joseph, 2004, hal. 7). Tetapi juga dalam penggunaan *soft power* tidak tergantung dengan *hard power* (Nye, Joseph, 2004, hal. 9). Penggunaan *soft power* akan sangat penting perannya dalam penanganan kasus terorisme seperti ini.

Dalam usaha pembebasan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina, pemerintah Indonesia mengutamakan opsi negosiasi yang dapat kita ketahui adalah bentuk dari *soft power* yang pemerintah Indonesia miliki. Mengandalkan *soft power* sebagai langkah utama bukanlah suatu pilihan yang lemah dalam menangani kasus seperti ini. Tentunya ada pertimbangan tertentu sehingga pemerintah Indonesia tetap menggunakan *soft power*-nya.

Menurut penulis, konsep *soft power* ini sesuai dengan pembahasan dari rumusan masalah yang nantinya akan dibahas oleh penulis karena selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengunggulkan penggunaan dari *soft power* sebagai langkah utama dalam menangani terorisme. Penulis nantinya akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah diatas menggunakan tabel dari sumber-sumber *soft power* dan bagan dari penggunaan *co-optive power*.

1.8 Metode Penelitian

Peneliti memilih untuk menggunakan metode kualitatif dalam mencari, mengumpulkan serta mengolah data untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur dalam penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari berbagai perilaku seseorang yang diamati (Moloeng, 1994). Artinya dalam hal ini penelitian kualitatif memfokuskan pada pengamatan aktivitas-aktivitas manusia untuk memperoleh suatu kebenaran dan keaslian terhadap objek yang diteliti. Maka dari itu, proses dari pengumpulan data adalah bagian terpenting dari penelitian kualitatif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif.

Oleh karena itu dalam penelitian ini laporan yang ditulis adalah berupa narasi cerita yang menggambarkan secara luas objek yang diamati. Menurut Kriyanto, peneliti perlu melakukan kegiatan berteori untuk menghasilkan dugaan awal (hipotesis) antar variabel yang satu dengan yang lainnya (Kriyantono, 2009, hal. 69).

1.8.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Adapun subjek yang akan diteliti oleh penulis yaitu diambil dari berbagai sumber yang membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembebasan sandera WNI khususnya pada era Presiden Joko Widodo dengan melakukan sebuah perbandingan antara kebijakan yang digunakan pemerintah Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus yang sama.

1.8.2 Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan atau studi literatur yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen yang disajikan dalam buku-buku, jurnal, dan berbagai artikel yang memuat tentang informasi yang juga berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini (Corbin, 1998). Artinya penulis dalam penelitian ini akan menggunakan data-data dan informasi untuk mendapatkan berbagai macam faktor yang menjelaskan

tentang mengapa *soft power* masih menjadi andalan pemerintah Indonesia dalam membebaskan WNI yang disandera Abu Sayyaf.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam menjawab objek penelitian adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder dapat dipahami sebagai informasi atau data yang didapat melalui tulisan, buku-buku, jurnal yang memuat informasi tentang penggunaan *soft power* sebagai langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi kelompok radikal Abu Sayyaf di era Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, diharapkan informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui studi kepustakaan dapat membantu pembaca dalam memahami kebijakan pemerintah Indonesia dalam membebaskan tawanan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

1.8.3 Proses Penelitian

Tahap awal, dalam menganalisis data adalah pengumpulan data yang telah didapatkan oleh peneliti yang memuat informasi terkait objek penelitian. Dalam proses pengumpulan data kualitatif adalah data yang berupa perilaku atau fenomena, dan sikap yang diperoleh peneliti. Tahap kedua, setelah proses pengumpulan data, penulis mencoba untuk membaca keseluruhan data atau informasi yang bertujuan untuk memahami ide-ide atau gagasan yang tersirat dalam data dan perlu diketahui dalam tahap pengumpulan data. Peneliti juga mencatat informasi penting untuk melakukan kategorisasi.

Tahap ketiga, yang dilakukan penulis adalah mengembangkan narasi yang didasarkan atas kategorisasi data atau informasi yang telah dilakukan pada tahap

sebelumnya. Tahap keempat, yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menuliskan hasil temuan-temuan yang diperoleh ketika proses pengembangan narasi dan dalam tahap ini peneliti juga mencoba untuk melakukan interpretasi terhadap berbagai temuan dari penelitian ini.

1.8.4 Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pengantar yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini akan menggambarkan secara keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan. BAB II akan membahas tentang kronologi kasus penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga membahas tentang diplomasi yang digunakan pemerintah Indonesia dan Filipina dalam menangani tindak terorisme oleh kelompok Abu Sayyaf. BAB III berisi mengenai analisa tentang penggunaan *soft power* yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi kelompok Abu Sayyaf. BAB IV sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dari bahasan masalah yang sudah telah diteliti dan dianalisa lebih lanjut.